

PERAN DAN MANFAAT KERJA SAMA DIBAWAH FORUM ASEAN COORDINATING COMMITTEE ON MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (ACCMSME) BAGI UMKM INDONESIA

Nabila Khoirunnisa

Faculty of Social Science and Political Science, Muhammadiyah University of Malang

nblnisaa30@gmail.com

ABSTRACT

The results of this research show that cooperation under the ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises (ACCMSME) forum has had a significant positive impact on the development and growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, including through its role as facilitator, ACCMSME is not only a coordination forum, but also supports Indonesian MSMEs in accessing the ASEAN regional market more effectively. This research was conducted using a qualitative approach, with descriptive research methods. This research uses data collection techniques carried out by the author through documentation studies. The documents collected by the author are closely related to discussions regarding cooperation for Indonesian MSMEs under the ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises (ACCMSME) forum.

Keywords: ASEAN, ACCMSME, Ministry of Cooperatives, Cooperation, MSMEs.

ABSTRAK

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama dibawah forum ASEAN *Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises* (ACCMSME) memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, diantaranya ialah melalui perannya sebagai fasilitator, ACCMSME bukan hanya menjadi wadah koordinasi, tetapi juga mendukung UMKM Indonesia dalam mengakses pasar regional ASEAN dengan lebih efektif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui studi dokumentasi. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh penulis berkaitan erat dengan pembahasan mengenai kerja sama bagi UMKM Indonesia dibawah forum ASEAN *Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises* (ACCMSME).

Kata Kunci: ASEAN, ACCMSME, Kemenkop, Kerjasama, UMKM.

Pendahuluan

Perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal maupun internasional hal ini dikarenakan adanya interdependensi dan interkoneksi dengan negara-negara di dunia pada era globalisasi¹. Dengan era globalisasi saat ini menjadikan faktor penentu yang harus dihadapi dengan menginkorporasikan ke dalam masyarakat global. UMKM menjadi salah satu organisasi dalam sektor bisnis yang menghadapi perekonomian di suatu negara termasuk Indonesia. Dengan adanya UMKM global tentu terbukanya persaingan bisnis antarnegara, UMKM di Indonesia perlu didukung oleh berbagai kalangan tak terkecuali oleh pemerintah dalam hal regulasi. UMKM menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 merupakan aktivitas bisnis yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja lebih luas dan memberikan kontribusi ekonomi yang merata kepada masyarakat. Selain itu, UMKM diharapkan dapat berperan dalam upaya pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjadi faktor stabilisasi dalam mencapai stabilitas nasional. Sebagai salah satu pilar ekonomi nasional, UMKM seharusnya mendapatkan dukungan, perlindungan, dan pengembangan secara maksimal sebagai bentuk dukungan terhadap sektor ekonomi rakyat².

Dalam konteks Undang-Undang No 20 Tahun 2008, UMKM adalah bisnis perdagangan yang dikelola oleh individu dan mengacu pada kegiatan ekonomi produktif dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kriteria UMKM meliputi tiga tingkatan, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta dan penjualan usaha tidak melebihi Rp 300 juta setiap tahunnya. Usaha kecil memiliki modal antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dengan hasil penjualan berkisar antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar per tahun. Sementara itu, usaha menengah memiliki modal atau kekayaan dalam rentang Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, dengan hasil penjualan mencapai Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar per tahun.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM seringkali terkait dengan rendahnya tingkat komitmen dalam memenuhi pesanan pelanggan dan ketersediaan produk di pasar. Kondisi ini umumnya dipicu oleh hambatan dalam aspek produksi, yang berasal dari kendala-kendala seperti modal yang tidak mencukupi, penggunaan teknologi yang sederhana, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, rencana pengembangan UMKM dapat diwujudkan dengan peningkatan modal kerja yang dapat digunakan untuk menambah biaya operasional, baik untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur maupun menambah persediaan bahan baku produksi. Pentingnya menilai kelayakan usaha menjadi aspek penting dalam merencanakan penambahan modal kerja. Penambahan modal kerja sebaiknya diberikan pada saat usaha dianggap memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang memadai

¹ J Enelitian Te et al., *Reformasi Struktur Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Korerasi (UMKMK) Yang Berkeadilan Bagi Peningkatan Daya Saing Dalam Era Liberalisasi*.

² Open Science et al., "A nalisis Finansial UKM Ivan ' s Bawen di Kecamatan Purbolinggo , Kabupaten Lampung Timur , Lampung Financial Analysis of Ivan ' s Bawen SEMs in Purbolinggo Subdistrict , Lampung Timur Regency , Lampung," 02.01 (2022), 41–53.

secara finansial. Oleh karena itu, suatu analisis kelayakan usaha perlu dilakukan untuk mengevaluasi apakah bisnis yang akan dijalankan memiliki prospek keuntungan yang menjanjikan di masa mendatang³.

Literature Review

Tulisan ini tidak terlepas dari beberapa penelitian terdahulu di mana kemudian penelitian ini tersebut akan dicantumkan untuk menghindari adanya kesamaan yang tidak disengaja. Selain itu, penelitian yang sudah ada sebelumnya digunakan sebagai referensi untuk memperluas pembahasan dalam tulisan ini

Penelitian pertama jurnal oleh Arianto Muditomo dan Indra Wahyudi ⁴, dalam jurnal penelitian berjudul **Conceptual Model for SME Digital Transformation During The Covid-19 Pandemic Time In Indonesia: R-Digital Transformation Model**, memaparkan tentang berdasarkan pemetaan transformasi digital UKM di Indonesia pada model R-DT kami telah berkembang, maka penulis menyimpulkan bahwa: Pemicu utama DT UKM adalah driver eksternal, tidak banyak driver internal telah ditemukan pada DT UKM khususnya selama pandemi COVID-19, transformasi yang dilakukan masih reaktif di alam

dan cenderung hanya mengikuti langkah-langkah transformasi aktor lain sehingga tidak menimbulkan keunikan tersendiri kata UKM yang mengakibatkan keluarnya peluang untuk mempunyai daya saing keunggulan dibandingkan pesaing; Masuk umum para pelaksana DT UKM telah menetapkan keharusan strategis bagi mereka keputusan untuk melakukan transformasi digital, namun belum menetapkan tonggak sejarah yang terukur bahwa transformasi digital dilakukan tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya. Peneliti/ menyarankan untuk dapat menggunakan model R-DT untuk membawanya melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi model untuk perbaikan dan/atau memberikan aliran model yang dapat menggambarkan pengambilan keputusan langkah-langkah dalam menentukan keharusan strategis dan pencapaian DT yang terukur. UKM bisa gunakan model R-DT untuk memandu pilihan strategi penerapan DT secara komprehensif dan terukur. Digital penyedia platform layanan dapat menggunakan model R DT untuk mengidentifikasi adanya peluang dalam menyediakan platform layanan digital untuk UKM.

Penelitian kedua jurnal oleh Mila Mumpuni ⁵, dalam jurnal penelitian berjudul **Kajian Fasilitas Kite Ikm Bagi Umkm Di Wilayah Magelang**, memaparkan tentang Regulasi awal yang termanifestasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.04/2016 menjadi bentuk pelayanan dari pemerintah pusat terkait dengan fasilitas fiskal untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Implementasi nasional dari regulasi ini telah menunjukkan peningkatan tingkat ekspor

³ Science et al.

⁴ Arianto Muditomo, Indra Wahyudi, dan West Java, "CONCEPTUAL MODEL FOR SME DIGITAL TRANSFORMATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC TIME IN INDONESIA : R-," 2021, 13–24.

⁵ D I Wilayah Magelang, "Kajian fasilitas kite ikm bagi umkm di wilayah magelang," 2025.

bagi industri kecil serta dampak positif terhadap ekonomi melalui efisiensi biaya produksi dan penghematan pajak. Meskipun di wilayah Magelang, baru satu Industri Kecil Menengah (IKM) yang terdaftar sejak tahun 2017 dan masih aktif memanfaatkan fasilitas KITE IKM. Dengan penguatan regulasi pada tahun 2019, peluang pemberian fasilitas KITE IKM diperluas, menekankan pentingnya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah di wilayah Magelang. Selain itu, diperlukan peran yang lebih aktif dari instansi vertikal Kementerian Keuangan untuk memberikan pembinaan dan klinik bagi calon penerima fasilitas KITE IKM. Memberikan fasilitas pajak adalah kebijakan yang bijaksana dari pemerintah dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, pajak dianggap sebagai instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Fasilitas KITE merupakan dukungan yang diberikan oleh pemerintah di sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan tujuan memberikan kesempatan kepada produsen atau pengusaha dalam negeri untuk meningkatkan perkembangan usahanya dan dapat bersaing dengan perusahaan multinasional. Langkah ini diambil pemerintah dengan menyederhanakan proses impor bahan baku untuk produksi barang jadi yang nantinya akan diekspor.

Penelitian ketiga buku oleh Efriyani Sumastuti, dan Qristin Violinda ⁶, dalam buku yang berjudul **UMKM, Jejak, Aksi & Solusi Saat Pandemi** memaparkan tentang bahwa tidak adanya negara yang telah sepenuhnya siap menghadapi dampak COVID-19, yang menyebabkan perekonomian mengalami penurunan signifikan. Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi salah satu yang paling terdampak karena memiliki kapasitas bisnis yang terbatas. Sebaliknya, pandemi COVID-19 telah mempercepat pergeseran ke arah teknologi digital. Dalam konteks ASEAN, dimana sebagian besar sektornya terdiri dari UKM, penting bagi kawasan ini untuk memanfaatkan dan mendorong kerjasama regional melalui ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises (ACCMSME). Strategi awal yang diperlukan adalah pengembangan kebijakan yang bersifat nasional dan lokal, karena pasar lokal dianggap memiliki peran krusial selama pandemi belum berakhir. Selanjutnya, UKM di ASEAN perlu memusatkan perhatian pada transformasi digital sebagai upaya untuk mendorong pendapatan online di tengah situasi COVID-19. Langkah terakhir setelah pandemi adalah memanfaatkan jaringan regional dalam rantai pasokan dan pasar intra-ASEAN. Peran penting juga dimiliki oleh hubungan perdagangan bilateral dan multilateral yang perlu ditingkatkan. Pembangunan rantai nilai dan rantai pasokan regional, bersama dengan potensi yang dimiliki oleh UKM dalam pemulihan ekonomi pasca COVID-19 di ASEAN, harus diperkuat untuk membangun ketahanan ekonomi dan sosial di kawasan ini.

Penelitian keempat oleh Ikumo Isono dan Hilmy Prilliadi⁷, dalam buku yang berjudul **ASEAN's Digital Integration: Evolution of Framework Documents** memaparkan skala dan tingkat integrasi digital di kawasan dan negara di luar ASEAN tidak dipertimbangkan. Oleh karena itu, penelitian di masa depan mungkin perlu melibatkan wilayah di luar ASEAN untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh, yang dapat memberikan kontribusi yang lebih substansial untuk penelitian,

⁶ Efriyani Sumastuti dan Qristin Violinda, *UMKM JEJAK, AKSI & SOLUSI SAAT PANDEMI*, 2021.

⁷ Ikumo Isono, *ASEAN 's Digital Integration : Evolution of Framework Documents*.

analisis, dan pengembangan integrasi digital. Penelitian mendatang juga dapat mengulas upaya Organisasi Perdagangan Dunia dan forum internasional terkait integrasi digital, mengingat peran penting yang dimainkan oleh organisasi tersebut dalam merumuskan peraturan perdagangan dan ekonomi digital. Selain itu, inisiatif nasional di negara-negara ASEAN juga dapat menjadi pokok pembahasan untuk penelitian lebih lanjut, tetapi studi ini tidak membahas secara mendalam inisiatif tersebut, kecuali dalam konteks menghubungkan pembentukan kerangka kerja dengan dampak yang sebenarnya. Terlepas dari keterbatasan studi ini pada dokumen integrasi digital ASEAN, beberapa dokumen melibatkan mitra dialog dan organisasi internasional dalam proses pembuatannya, walaupun studi ini kurang memberikan rujukan yang memadai terkait bentuk dan pola kerja sama dengan organisasi lain. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam di luar cakupan ASEAN dan perlunya mempertimbangkan upaya lembaga lain yang berkontribusi dalam merumuskan kebijakan dan regulasi integrasi digital. Kesimpulannya, melalui berbagai inisiatifnya, ASEAN tidak hanya menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia tetapi juga telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat dalam pasar internet dan ekonomi digital. Studi ini dengan jelas menunjukkan percepatan upaya ASEAN dalam beberapa tahun terakhir. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, ASEAN telah mampu mengidentifikasi dan menghadapi tantangan tersebut. Menuju tahun 2025-tahun yang krusial bagi komunitas dan integrasi digital – ASEAN perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk mempercepat integrasi digital dan sepenuhnya merealisasikan potensi ekonomi digital.

Penelitian kelima oleh Koesrianti⁸, dalam laporan penelitian yang berjudul **Reformasi Struktur Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKMK) yang Berkeadilan Bagi Peningkatan Daya Saing Dalam Era Liberalisasi Perdagangan MEA** memaparkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya menjadi kontributor tetapi juga tulang punggung utama ekonomi negara, memainkan peran krusial dalam pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Keberadaan UMKM sangat signifikan, jauh melampaui jumlah perusahaan besar, sehingga memiliki dampak besar terhadap skala dan dinamika ekonomi secara keseluruhan. Salah satu keunggulan utama UMKM adalah resistensinya yang tinggi terhadap krisis ekonomi. Mampu bertahan dalam kondisi sulit, UMKM menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara, terutama di masa-masa sulit seperti krisis ekonomi. Selain itu, kapasitas UMKM untuk menyerap tenaga kerja secara besar-besaran menjadikannya sebagai solusi yang efektif dalam mengatasi isu pengangguran, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam mendukung eksistensi UMKM, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan sektor ini. Langkah-langkah tersebut melibatkan penyederhanaan proses perizinan, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan mematuhi persyaratan tersebut, UMKM dapat

⁸ Te et al.

memperoleh legalitas usaha dan perlindungan hukum yang diperlukan. Pentingnya perizinan tidak hanya terletak pada aspek regulasi semata, tetapi juga pada kemampuan UMKM untuk bersaing dalam konteks ekonomi global, terutama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam era ini, UMKM perlu dapat mengakses dan memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas, dan pemanfaatan teknologi, termasuk permohonan perizinan secara online, menjadi krusial dalam mendukung daya saing mereka. Dalam konteks ini, sosialisasi mengenai tahapan permohonan perizinan online menjadi esensial. Sosialisasi ini bukan hanya sebatas penjelasan tetapi juga mencakup praktek langsung dan pendampingan kepada pelaku usaha. Meskipun ada opsi untuk memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengurus perizinan, keterlibatan langsung dari pelaku usaha dianggap lebih baik karena mereka memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan keadaan perusahaan mereka. Melalui langkah-langkah ini, UMKM diharapkan dapat memaksimalkan potensinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai keberlanjutan di masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang ada berdasarkan pola penjelasan yang menggambarkan secara sederhana dan sistematis tentang fakta-fakta serta karakteristik dan subjek yang diteliti. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini berupa kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian untuk memahami fenomena berdasarkan analisis dokumen yang disajikan melalui uraian yang bersifat naratif. Penulis berusaha untuk menjelaskan peran dan manfaat kerja sama bagi UMKM Indonesia dibawah forum ASEAN *Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises* (ACCMSME).

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen yang telah tersedia berupa buku, jurnal, e-book, working paper, artikel dan berita online yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan kajian yang bersifat sistematis. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh penulis berkaitan erat dengan pembahasan mengenai kerja sama bagi UMKM Indonesia dibawah forum ASEAN *Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises* (ACCMSME).

Fokus artikel jurnal yang akan dimasukkan dalam lampiran-lampiran menggunakan konsep kerjasama internasional dimana suatu kerjasama dapat terwujud ketika negara-negara tersebut memiliki kesamaan tujuan atau *common interest*, suatu kerjasama akan tidak mungkin terjadi ketika tidak memiliki kesamaan tujuan. Secara definisi kerjasama internasional adalah hubungan antar bangsa yang mempunyai tujuan berdasarkan kepentingan nasional. Kondisi setiap negara yang dinamis mereduksi negara-negara untuk mulai melakukan kerjasama yang disesuaikan dengan kepentingan nasional masing-masing negara.

Kerjasama internasional pada awalnya terjadi dikarenakan adanya situasi yang menjadi masalah nasional, regional, maupun global sehingga menimbulkan pandangan dalam upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, lalu hal tersebut akhirnya negara-negara mulai melakukan pendekatan dengan membawa ide, gagasan, atau solusi yang coba ditawarkan kemudian melakukan perundingan hingga membuat konklusi dari hasil pengumpulan ide tersebut. Pendekatan yang dilakukan setiap negara tentu menyelaraskan dengan kepentingan nasional masing-masing. Pada akhirnya serangkaian proses tersebut melahirkan sebuah perjanjian yang dapat memiliki kebermanfaatan bagi semua pihak⁹.

Kerjasama internasional menurut K.J Holsti didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persersetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Aktor-aktor dalam kerjasama internasional bermacam-macam seperti negara, non governmental organization (NGO), individu, maupun perusahaan sehingga kerjasama dapat terjadi antar negara, antar organisasi ataupun antar individu maupun perusahaan. Pembahasan kerjasama biasanya disesuaikan dengan isu seperti ekonomi, keamanan, lingkungan, dan lain-lain. Kerjasama internasional tentunya dapat terwujud karena memiliki dasar kepentingan yang sama dan bekerja dengan prinsip yang saling menguntungkan. Kerjasama sendiri terbagi dalam tiga bentuk yaitu Kerjasama Bilateral, Kerjasama Regional, dan Kerjasama Multilateral.

Pada artikel jurnal yang menjadi judul penelitian berisi tentang bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dalam bidang ekonomi berupa pengoptimalan Koperasi, UKM, dan UMKM. Kerjasama internasional yang dilakukan biasanya terjalannya hubungan antar negara dan organisasi internasional dalam membuat suatu perjanjian yang menghasilkan kebijakan pada masing-masing pihak.

Analisis

a. *ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises (ACCMSME)*

Pada tahun 2015, negara-negara anggota ASEAN telah menyetujui Rencana Aksi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Rencana Aksi MEA 2025 akan dikembangkan berdasarkan Rencana Aksi MEA 2015 yang terdiri dari lima karakteristik saling terkait

⁹ Bintang Ramadhan, Yusuf Khadafi, dan M Syaprin, "Diplomasi Pertahanan : Kerjasama Intelejen di Asean Our Eyes sebagai Peningkatan Stabilitas Keamanan Asia Tenggara," 16.1 (2023), 56–69.

dan saling memperkuat, diantaranya: perekonomian yang terpadu dan sepenuhnya terintegrasi; ASEAN yang bersaing, inovatif, dan dinamis; peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat; dan ASEAN yang berskala global. Guna melaksanakan Rencana Aksi MEA 2015, disusunlah *skorcard* yang berisi *deliverables*, dengan jumlah 611 langkah aksi dalam kategori *Full Scorecard* dan 506 langkah aksi dalam kategori *Focused Base*. MEA 2025 adalah kelanjutan dari MEA 2015 dan memiliki tujuan untuk meningkatkan integrasi dan kohesi ekonomi ASEAN, membuatnya lebih berdaya saing dan dinamis, meningkatkan konektivitas dan kerja sama sektoral, menciptakan ASEAN yang tangguh, inklusif, berorientasi pada masyarakat, dan berskala global. Kerja sama ekonomi ASEAN dalam MEA 2025 melibatkan sejumlah sektor, seperti industri, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Di samping itu, kerja sama juga mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). MEA memberikan peluang dan kesempatan yang besar bagi Indonesia yang harus dimanfaatkan secara optimal mengingat potensi jumlah penduduk yang besar dan peningkatan daya beli di wilayah ASEAN. Integrasi ekonomi regional diharapkan dapat mengurangi hambatan perdagangan, menjadikan Asia Tenggara sebagai basis produksi dan pasar yang satu kesatuan, menarik Foreign Direct Investment (FDI), dan meningkatkan daya saing nasional. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong dan memastikan peningkatan integrasi ekonomi di ASEAN, dengan tujuan memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat di kawasan ini. Selain itu, peningkatan kapasitas dan daya saing nasional juga menjadi fokus utama, agar Indonesia dapat memaksimalkan peluang yang terbuka di dalam MEA¹⁰.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Negara-negara Anggota ASEAN. Dengan adanya definisi yang berbeda, terdapat 70 juta UMKM di ASEAN, yang mencakup antara 97,2% - 99,9% dari total usaha di Negara-negara Anggota ASEAN. Jika data tersedia, usaha mikro seringkali merupakan bagian terbesar dari usaha. Secara regional, UMKM menyumbang 85% terhadap lapangan kerja, 44,8% terhadap PDB, dan 18% terhadap ekspor nasional. Angka-angka ini menunjukkan bahwa UMKM memainkan peran penting terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, berkontribusi terhadap kegiatan yang bernilai tambah, inovasi dan pertumbuhan inklusif melalui penciptaan lapangan kerja dan kehadiran mereka yang luas baik di perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu, UMKM merupakan tulang punggung ASEAN dan berperan penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan serta mempersempit kesenjangan pembangunan.

Sejak tahun 2016, Kementerian Koperasi dan UKM bertindak sebagai *focal point* dalam kerja sama ASEAN *Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium*

¹⁰ Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, "Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk kerja sama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN," *Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia* <<https://setnasasean.id/pilar-ekonomi>>.

Enterprises (ACCMSME). Forum kerja sama tersebut menjembatani sinergi dan integrasi program-program kerja di level ASEAN dengan program kerja nasional, khususnya dalam pengembangan UMKM. Partisipasi Kementerian Koperasi dan UKM dalam ACCMSME diwujudkan melalui keterlibatan dalam kegiatan dan program-program pengembangan UMKM yang diimplementasikan di negara anggota ASEAN, yang mengacu pada Rencana Aksi Strategis Pengembangan UMKM ASEAN (*Strategic Action Plan on SMEs Development*). Pada tahun 2016 ASEAN telah meluncurkan ASEAN SME Academy, sebuah website yang berisi pelatihan online yang diperuntukkan bagi UKM khususnya di kawasan ASEAN. Tujuan dari pembentukan website ini adalah sebagai *platform* untuk meningkatkan kemampuan UKM dalam mendapatkan akses keuangan, akses pasar, dan informasi mengenai teknologi dan inovasi, dengan harapan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh UKM. ASEAN SME Academy menyediakan 50 jenis pelatihan yang ditawarkan dari 500 perusahaan dan anggota *US-ASEAN Business Alliance for Competitive SMEs*. Terdapat juga sebanyak 350 *links* yang berisi informasi bisnis yang relevan dengan kebutuhan UKM, seperti informasi akses keuangan, program-program perusahaan dan jaringan yang dapat diakses secara langsung oleh UKM. Sebagai salah satu upaya dalam mempromosikan dan menyebarkan informasi mengenai ASEAN SME Academy, ASEAN telah menyelenggarakan *Training of Facilitators (ToF)* pada tahun 2016 di sejumlah negara ASEAN, termasuk Indonesia. Pelatihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26-27 Oktober 2016 bertempat di Jakarta, dan dihadiri oleh sebanyak 30 fasilitator, termasuk di antaranya pendamping Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Para peserta pelatihan dipilih dan dikoordinir oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai *focal point ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises (ACCMSME)* di Indonesia.

Keterlibatan pendamping PLUT dalam *Training of Facilitators (ToF)* dimaksudkan agar para pendamping PLUT dapat menyebarkan informasi mengenai ASEAN SME Academy kepada para pelaku UKM yang berada di bawah bimbingannya di daerah masing-masing. Selain itu diharapkan pendamping PLUT mampu membantu dan membimbing UKM dalam menggunakan dan mengakses ASEAN SME Academy, sehingga UKM dapat memperoleh wawasan dan keterampilan dalam upaya peningkatan kapasitas UKM melalui ASEAN SME Academy.

b. Peran dan Manfaat ASEAN Coordinating Committee On Micro, Small, And Medium Enterprises (ACCMSME) Bagi UMKM Indonesia

Kerja sama di dalam Forum ASEAN *Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises (ACCMSME)* tidak hanya memiliki dampak positif yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia, melainkan juga memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan dan pemberdayaan sektor UMKM di tingkat ASEAN. Fokus ACCMSME terletak pada upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM, peran bagi UMKM Indonesia, diantaranya:

1. Koordinasi dan harmonisasi kebijakan menjadi aspek krusial yang diemban oleh

ACCMSME. Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi strategis untuk menyelaraskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan UMKM di seluruh negara anggota ASEAN. Upaya ini bertujuan menciptakan suatu lingkungan usaha yang terintegrasi dan konsisten di seluruh wilayah ASEAN, sehingga mendukung secara efektif pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM. Dengan demikian, ACCMSME memiliki peran yang mendasar dalam mencapai konsistensi regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM di tingkat regional.

2. Dapat mengakses pasar regional yang dijalankan oleh ACCMSME, dalam forum ini

memiliki peran sebagai penengah untuk memudahkan UMKM Indonesia dalam mengakses pasar regional ASEAN. Upaya ini melibatkan dukungan komprehensif, termasuk strategi pemasaran, promosi produk, dan integrasi UMKM ke dalam rantai pasokan yang beroperasi di tingkat regional. ACCMSME berusaha untuk memberikan dukungan yang holistik guna memastikan bahwa UMKM Indonesia tidak hanya dapat meraih akses pasar regional secara lebih mudah, tetapi juga dapat terlibat secara efektif dalam proses rantai pasokan regional yang lebih luas. Dengan demikian, ACCMSME memainkan peran kunci dalam meningkatkan daya saing dan eksistensi UMKM Indonesia di pasar ASEAN.

Manfaat yang didapatkan bagi UMKM terhadap forum ACCMSME, diantaranya:

1. Melalui partisipasi dalam ACCMSME, UMKM Indonesia mendapatkan kesempatan

untuk meningkatkan aksesnya ke pasar regional ASEAN. Dalam konteks ini, terbuka peluang baru bagi UMKM untuk mengembangkan bisnisnya secara lebih luas dan meningkatkan volume penjualan mereka. Keanggotaan dalam ACCMSME membuka pintu bagi UMKM Indonesia untuk terlibat dalam jejaring bisnis regional, menciptakan platform yang memungkinkan mereka menjelajahi pasar-pasar baru di seluruh kawasan ASEAN. Dengan demikian, ACCMSME bukan hanya menjadi forum koordinasi, melainkan juga menjadi gerbang yang membuka potensi pertumbuhan dan ekspansi bagi UMKM Indonesia di tingkat regional.

2. Kerja sama di tingkat regional, seperti melalui partisipasi dalam ACCMSME, memberikan peluang bagi UMKM Indonesia untuk memperluas jaringan bisnisnya ke tingkat yang lebih luas. Melalui interaksi dan kolaborasi dengan pelaku bisnis dari negara-negara ASEAN lainnya, UMKM memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan yang berpotensi memberikan manfaat yang signifikan. Dalam konteks ini, terbuka peluang untuk menjalin kolaborasi strategis, pertukaran sumber daya, dan membangun jejaring yang saling mendukung antar-UMKM di seluruh kawasan. Dengan demikian, pengembangan jaringan bisnis melalui kerja sama regional seperti ACCMSME tidak hanya menciptakan kesempatan baru bagi UMKM, tetapi juga membangun fondasi untuk kolaborasi yang saling menguntungkan di antara pelaku bisnis skala kecil dan menengah di ASEAN.

3. Melalui keterlibatan aktif dalam ACCMSME, UMKM Indonesia memiliki

kemudahan dalam mengakses pembiayaan serta sumber daya tambahan yang sangat diperlukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan bisnis mereka. Melalui jejaring dan program yang diselenggarakan oleh ACCMSME, UMKM dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai berbagai opsi pembiayaan, baik dari lembaga keuangan regional maupun program dukungan khusus untuk UMKM. Selain pembiayaan, akses yang lebih baik ke sumber daya, seperti pelatihan, mentorship, dan infrastruktur bisnis, juga dapat diperoleh melalui partisipasi dalam ACCMSME. Ini memberikan dukungan holistik yang memungkinkan UMKM Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka di tingkat ASEAN.

c. Program-Program ACCSME

Pertemuan ACCMSME merupakan pertemuan regional komite UMKM yang beranggotakan 10 negara ASEAN. Pertemuan tersebut dilaksanakan dua kali dalam setahun, di mana dilakukan pembahasan mengenai isu-isu strategis UMKM dan program-program ASEAN terkait UMKM, serta progres kerja sama dan kemitraan ASEAN dengan organisasi lainnya. Beberapa pokok pembahasan program yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM yang penting antara lain sebagai berikut:

A. ASEAN SME Policy Index (ASPI) 2018

ASPI 2018 merupakan program kerja sama ASEAN - OECD yang sudah berjalan sejak tahun 2017, di mana sesuai dengan yang disepakati dalam ACCMSME, OECD selaku organisasi mitra melakukan penilaian terhadap kebijakan UMKM di seluruh AMS. Penilaian kebijakan ini sebagai kajian yang bertujuan untuk menggambarkan indeks kebijakan UMKM dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan. Pada tahun 2018 Indonesia mendapatkan skor indeks sebesar 4,11 dan berada di peringkat ke-4, setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Saat ini OECD tengah menyusun laporan akhirnya di mana nantinya hasil resminya akan dipublikasi pada akhir tahun 2018 dan akan disosialisasikan melalui workshop yang dihadiri oleh sejumlah K/L terkait yang memiliki kebijakan pengembangan UMKM dan terlibat dalam penyusunan ASPI 2018.

B. Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship

Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship, sebuah program review kebijakan pengembangan UMKM dan kewirausahaan di Indonesia yang merupakan bagian dari kerangka kerja sama ASEAN-OECD. Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 97% lapangan kerja domestik berasal dari UKM, sementara 56% dari total investasi bisnis juga diperoleh dari sektor ini. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kementerian yang secara khusus didedikasikan untuk mengelola koperasi dan UKM. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung UKM, terdapat peluang untuk menyederhanakan program tersebut dan meningkatkan dukungan bagi perusahaan inovatif yang dapat menciptakan lapangan kerja produktif dan berpartisipasi di pasar internasional. Pengembangan dan implementasi strategi UKM menjadi sangat penting untuk meningkatkan koherensi

langkah-langkah kebijakan nasional, serta untuk mencapai tujuan dan target yang dapat diukur secara konkret ¹¹.

C. ASEAN Business Incubator Network (ABINeT) Project

ASEAN Business Incubator Network (ABINeT) Project merupakan project yang lahir dari kerja sama ASEAN dan Jepang, dengan sumber pendanaan bersal dari JAIF. Tujuan utama dari project ini adalah mengembangkan pusat-pusat inkubator bisnis dan teknologi untuk peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM di ASEAN. Project ini akan dimulai pada pertengahan tahun 2018 sampai 2020, di mana Deputy Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM bertindak sebagai project proponent dengan menggandeng Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI) dalam implementasi project tersebut. Program yang akan dilaksanakan dalam project tersebut antara lain: Implementasi ASEAN model business incubation, Pengembangan database informasi, Menyelenggarakan business matching bagi UKM yang diinkubasi, Melaksanakan program co-incubation ASEAN, Mengadopsi program virtual business incubation, dan Mengidentifikasi pakar/ahli inkubator UKM yang dapat dimanfaatkan oleh inkubator ASEAN.

D. ASEAN Mentorship for Entrepreneurs Network (AMEN)

ASEAN Mentorship for Entrepreneurs Network (AMEN) merupakan program jaringan mentor bisnis ASEAN yang melibatkan private sector dan pemerintah diinisiasi oleh Filipina. Project ini direncanakan dimulai pada pertengahan tahun 2018 dan akan diimplementasikan di seluruh AMS. Project ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM melalui program capacity building dengan bimbingan dari sejumlah mentor UKM dari ASEAN.

E. Future of ASEAN-50 Success Stories of Digitalized MSMEs

Sebagaimana telah disepakati dalam Sidang 5th ACCMSME bahwa ASEAN akan kembali bekerja sama dengan Jepang dalam menyusun buku success story UKM ASEAN. Penyusunan Future of ASEAN 50 Success Stories of Digitalised MSMEs kali ini akan memuat profil dari 50 UKM di ASEAN yang telah sukses, terutama bagi UKM digital dan start-up, yang telah memanfaatkan teknologi sebagai basis menjalankan usahanya.

Sebagai langkah awal penyusunan, Kementerian Koperasi dan UKM selaku focal point ACCMSME ditugaskan untuk mengusulkan sejumlah UKM Indonesia yang telah memanfaatkan platform digital untuk dapat dimuat dalam daftar success story tersebut.

F. ASEAN Economic Community (AEC)

AEC memiliki manfaat bagi UMKM, diantaranya Kementerian Koperasi dan UKM berfungsi sebagai titik fokus dalam ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises (ACCMSME). Forum kerja sama ini memfasilitasi sinergi dan integrasi program kerja di tingkat ASEAN dengan program kerja nasional, khususnya dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

¹¹ OECD, "SME and Entrepreneurship Policy in Indonesia 2018," *OECDiLibrary* <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/sme-and-entrepreneurship-policy-in-indonesia-2018/sme-and-entrepreneurship-characteristics-and-performance-in-indonesia_9789264306264-5-en>.

Partisipasi Kementerian Koperasi dan UKM dalam ACCMSME terwujud melalui keterlibatan dalam kegiatan dan program pengembangan UMKM yang dilaksanakan di negara-negara anggota ASEAN, mengacu pada Rencana Aksi Strategis Pengembangan UMKM ASEAN (Strategic Action Plan on SMEs Development) ¹².

G. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)

Kerja sama antara Indonesia dan China, bersama dengan negara-negara di Kawasan ASEAN, sebelum adanya Comprehensive Economic Cooperation (ACFTA), menghasilkan surplus untuk Indonesia setiap tahunnya. Namun, sejak ACFTA terbentuk pada tahun 2007, neraca perdagangan Indonesia dengan China mengalami dominasi defisit. Bahkan, kecenderungan defisit tersebut semakin membesar dari tahun ke tahun seiring dengan penerapan ACFTA secara resmi pada tahun 2010. China mampu lebih efektif memanfaatkan perjanjian dagang ini, dan dampaknya terlihat melalui banjirnya produk impor China di pasar domestik Indonesia melalui ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)¹³.

Kesimpulan

Partisipasi dan kerja sama dalam ASEAN *Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises* (ACCMSME) memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, diantaranya ialah melalui perannya sebagai fasilitator, ACCMSME bukan hanya menjadi wadah koordinasi, tetapi juga mendukung UMKM Indonesia dalam mengakses pasar regional ASEAN dengan lebih efektif. Dengan terjalannya koordinasi yang sinergis dan dukungan aktif dari ACCMSME, UMKM dapat mengimplementasikan strategi pemasaran yang lebih efisien, mempromosikan produk dan layanannya ke berbagai negara ASEAN. Konsekuensinya, hal ini tidak hanya menciptakan peluang baru untuk peningkatan volume penjualan UMKM, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk ekspansi bisnis ke pasar-pasar regional yang potensial. Melalui kolaborasi di bidang riset dan inovasi yang difasilitasi oleh ACCMSME, UMKM Indonesia dapat memanfaatkan sebuah platform yang memungkinkan pertukaran pengetahuan dan ide-ide kreatif. Keberadaan ini membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif, menciptakan keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar regional. Dengan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara pelaku industri mikro, kecil, dan menengah, UMKM dapat memperoleh wawasan yang berharga, merangsang inovasi produk, dan mengoptimalkan daya saing mereka dalam menghadapi persaingan di tingkat ASEAN. Dengan fungsi katalisatornya, ACCMSME menjadi kekuatan penggerak yang efektif dalam mengakselerasi laju pertumbuhan dan perkembangan UMKM Indonesia. Peran ACCMSME bukan hanya sebatas menciptakan peluang baru, tetapi juga memberikan dukungan yang berkelanjutan untuk memperkuat sektor UMKM, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Kesenambungan dukungan ini menciptakan

¹² Akhmad Akbar Susanto et al., *STRATEGI PERCEPATAN EKSPOR PRODUK HALAL USAHA KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA*, 2021.

¹³ Susanto et al.

lingkungan yang mendukung bagi UMKM untuk terus berkembang, menjelajahi pasar-pasar baru, dan menghadapi tantangan dengan keyakinan. Dengan demikian, ACCMSME bukan hanya menjadi penyokong, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam memajukan ekosistem UMKM Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Penulis merekomendasikan mengenai peningkatan lebih lanjut terhadap kebijakan yang diambil Indonesia untuk dapat memaksimalkan manfaat dalam kerja sama ACCMSME, diantaranya dalam penguatan infrastruktur dukungan UMKM, peningkatan akses dalam pembiayaan, pengembangan program mentoring dan kolaborasi bisnis ataupun dengan pihak swasta maupun lembaga keuangan lainnya, melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap inovasi teknologi dan digitalisasi, mengadakan monitoring dan melakukan evaluasi secara berkala.

References

- Isono, Ikumo, *ASEAN ' s Digital Integration : Evolution of Framework Documents*
- Magelang, D I Wilayah, “Kajian fasilitas kite ikm bagi umkm di wilayah magelang,” 2025
- Muditomo, Arianto, Indra Wahyudi, dan West Java, “CONCEPTUAL MODEL FOR SME DIGITAL TRANSFORMATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC TIME IN INDONESIA : R-,” 2021, 13–24
- OECD, “SME and Entrepreneurship Policy in Indonesia 2018,” *OECDiLibrary* <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/sme-and-entrepreneurship-policy-in-indonesia-2018/sme-and-entrepreneurship-characteristics-and-performance-in-indonesia_9789264306264-5-en>
- Ramadhan, Bintang, Yusuf Khadafi, dan M Syaprin, “Diplomasi Pertahanan : Kerjasama INTELEJEN di Asean Our Eyes sebagai Peningkatan Stabilitas Keamanan Asia Tenggara,” 16.1 (2023), 56–69
- Science, Open, Wintari Mandala, Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Nahdlatul, dan Ulama Lampung, “A nalisis Finansial UKM Ivan ' s Bawen di Kecamatan Purbolinggo , Kabupaten Lampung Timur , Lampung Financial Analysis of Ivan ' s Bawen SEMs in Purbolinggo Subdistrict , Lampung Timur Regency , Lampung,” 02.01 (2022), 41–53
- Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, “Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk kerja sama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN,” *Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia* <<https://setnasasean.id/pilar-ekonomi>>

Sumastuti, Efriyani, dan Qristin Violinda, *UMKM JEJAK, AKSI & SOLUSI SAAT PANDEMI*, 2021

Susanto, Akhmad Akbar, Yudi Ahmad Faisal, Ebi Junaedi, Ardi Apriliadi, Muhammad Ishak Razak, Rasi Tamadhika Fajar Ramadhan, et al., *STRATEGI PERCEPATAN EKSPOR PRODUK HALAL USAHA KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA*, 2021

Te, J Enelitian, R A I An, Unggulan P Ergu, Ruan T Ingg, P E N Ing, K A Tan, et al., *Reformasi Struktur Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Korerasi (UMKMK) Yang Berkeadilan Bagi Peningkatan Daya Saing Dalam Era Liberalisasi*